



DAFTAR ISI

PENJAMINAN HAK PILIH WARGA NEGARA DI LUAR NEGERI: KAJIAN INSTRUMENTASI PEMILU

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAKSI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. <i>Literatur Review</i>	11
1. Kajian Instrumentasi; Model Reformulasi beberapa Negara	11
2. Kajian Hak Pemilih; Kewajiban Negara Memenuhi Hak Pilih	14
E. Landasan Teori	18
F. Operasionalisasi Teori	24
G. Metode Penelitian	27
1. Jenis dan Sifat Penelitian	27
2. Sumber Data dan Data	28
3. Teknik Pengumpulan Data	30
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	31
5. Langkah-Langkah Penelitian	33
H. Sistematika Penulisan	33



KEBIJAKAN, INSTRUMEN REGULASI DAN PENDATAAN PEMILIH DI LUAR NEGERI	35
A. Pengantar	35
B. Kebijakan Penyelenggara Pemilu	35
C. Instrumen Regulasi Pemilu di Luar Negeri	47
1. Aturan Main bagi Pemilih di Luar Negeri	47
2. Peran Penyelenggara Pemilu dalam Menyusun Regulasi Pemilu di Luar Negeri	58
3. Regulasi Teknis dalam Pemilu Luar Negeri	61
4. Kelebihan dan Kelemahan Instrumen Regulasi Penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri	64
D. Pendataan Pemilih dalam Pemilu di Luar Negeri	65
1. Penyediaan Data Kependudukan oleh Pemerintah	68
2. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Luar Negeri (DP4LN)	69
3. Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri	70
4. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN)	71
5. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri (DPSHPLN)	71
6. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)	72
7. Daftar Pemilih Tetap Tambahan Luar Negeri (DPTbLN)	72
8. Daftar Pemilih Khusus/Khusus Tambahan Luar Negeri (DPKLN/DPKtbLN)	73
E. Kesimpulan	74
 BAB III PERMASALAHAN DALAM INSTRUMEN REGULASI DAN PENDATAAN PEMILIH DI LUAR NEGERI	 76
A. Pengantar	76
B. Permasalahan yang dihadapi dalam Instrumen Regulasi	77
1. Simplifikasi Regulasi	77
a. Penyamaan Regulasi di Luar Negeri dengan di Dalam Negeri	77
b. Simplifikasi Antar-Negara	79
2. Regulasi yang ketat	85



3. Kesulitan dalam menerapkan regulasi di lapangan	87
C. Permasalahan dalam Proses Pendataan di Luar Negeri	96
1. Basis Data Kependudukan Luar Negeri	102
2. Jumlah Petugas Pemutakhiran Luar Negeri	105
3. Stelsel Pasif dalam Proses Pemutakhiran	107
4. Publikasi Hasil Pemutakhiran	109
D. Kesimpulan	110
BAB IV TAWARAN REFORMULASI INSTRUMEN REGULASI DAN	
PENDATAAN PEMILIH DI LUAR NEGERI	112
A. Pengantar	112
B. Tawaran Reformulasi Instrumen Regulasi	113
1. Akomodasi Permasalahan	113
2. Penyusunan regulasi berbasis kebutuhan	117
3. Fleksibilitas Regulasi untuk mengatasi permasalahan	121
C. Tawaran Reformulasi Instrumen Data Warga Negara	124
1. Penyusunan Database Pemilih di Luar Negeri	125
2. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	129
3. Stelsel aktif dalam Pemutakhiran Data	133
D. Kesimpulan	136
BAB V PENUTUP	138
A. Kesimpulan	138
B. Rekomendasi	143
1. Reformulasi Instrumen Regulasi	143
a. Pemerintah dan DPR RI	144
b. Komisi Pemilihan Umum	145
2. Reformulasi Instrumen Pendataan Pemilih	149
a. Kementerian Luar Negeri	149
b. Komisi Pemilihan Umum	150
3. Reformulasi Instrumen Ekonomi dan Komunikasi	155
a. Pemerintah	155
b. Komisi Pemilihan Umum	156



C. Roadmap Pelaksanaan Rekomendasi	156
a. Jangka Pendek; Komisi Pemilihan Umum	157
b. Jangka Pendek; Kementerian Luar Negeri	161
c. Jangka Panjang; Pemerintah dan DPR RI	162
d. Jangka Panjang; Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Luar Negeri	163
 DAFTAR PUSTAKA	 165



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	<i>Missing Link</i> Jaminan Hak Pilih	9
GAMBAR 2	Instrumentasi Kebijakan Pemilu di Luar Negeri	21
GAMBAR 3	Operasionalisasi Instrumentasi Regulasi	26
GAMBAR 4	Faktor Internal Hambatan Pemungutan Suara Pileg	66
GAMBAR 5	Surat Undangan untuk Memilih PPLN Hongkong dengan Barcode Pemilih	127



DAFTAR TABEL

TABEL 1	Peran dan Pendataan Instansi Negara untuk Warga Negara di Luar Negeri	4
TABEL 2	Perbedaan Rumusan Amar Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 dengan UU Nomor 8 Tahun 2012	40
TABEL 3	Undang-Undang yang memuat Aturan Penyelenggaraan Pemilu RI di Luar Negeri	48
TABEL 4	Daftar Peraturan KPU tentang Pemilu Luar Negeri pada Pemilu Tahun 2014	49
TABEL 5	Roadmap Pelaksanaan Rekomendasi	157